

A. Latar Belakang

Era globalisasi dan keterbukaan telah mengubah wajah dunia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Mengalirnya informasi dan beragam sumber daya secara bebas dalam lingkungan interaksi lintas negara maupun lintas regional dalam suatu negara telah membawa berbagai perubahan yang dinamis dimana belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Untuk dapat tetap bertahan menjadi bagian dari kehidupan Bangsa Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan memacu diri untuk meningkatkan daya saingnya, agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sanggup pula menjadi komunitas terbaik yang diperhitungkan keberadaannya dalam percaturan nasional dan pergaulan dunia.

Kenyataan menunjukkan bahwa daya saing sebuah wilayah (provinsi) tidak lagi terletak secara dominan pada sumber daya alam yang dimiliki, namun terletak pada kualitas sumber daya manusia dengan pengetahuan dan kompetensi yang dimilikinya untuk mengubah berbagai aset dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini jelas terlihat bahwa aspek pendidikan – baik yang bersifat formal, non-formal, maupun informal – menjadi kunci bagi keberhasilan pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan pendidikan ini sebagai kebijakan strategis bersifat strong point melalui pengembangan mutu pendidikan dengan jalan membangun dan meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, bermakna dan terjangkau demi pembangunan manusia (*pro human development*).

Dimensi lain bahwa; bahwa proses pendidikan tidak semata berfokus kepada peningkatan mutu, melainkan juga memperhatikan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan pendidikan untuk mewujudkan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel,

terutama yang menyangkut pelaksanaan dan penganggaran sehingga dapat menciptakan citra dan pelayanan satuan pendidikan bermutu secara sehat dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana diperlukan keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel. Oleh karena itu, sesuai tugas pokok dan fungsinya, OPD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, berkewajiban memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pengelolaan program, kegiatan dan penganggaran yang salah satunya dalam bentuk Laporan Kinerja sebagai implementasi dari penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) SKPD Disdik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penggunaan anggaran yang dikelola. Selain itu LKj ini merupakan perwujudan kinerja dalam pencapaian Visi dan Misi sebagaimana yang dijabarkan dalam Renstra SKPD Periode 2018 – 2023 dan Rencana Kerja OPD Tahun 2023.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan bagi anak bangsa, berperan sebagai transformer budaya terhadap pengembangan amanat dan pemegang estafet pemerintahan di masa yang akan datang, memfasilitasi pembekalan generasi muda dengan idealisme dan jati diri, serta penanaman nilai – nilai luhur bagi generasi muda / peserta didik yang diakui kebenarannya oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam BAB IV, Pasal 14 Peraturan Daerah No: 8 Tahun 2008, Dinas Pendidikan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan di bidang

pendidikan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan fungsi sebagaimana dalam pasal 15 yaitu :

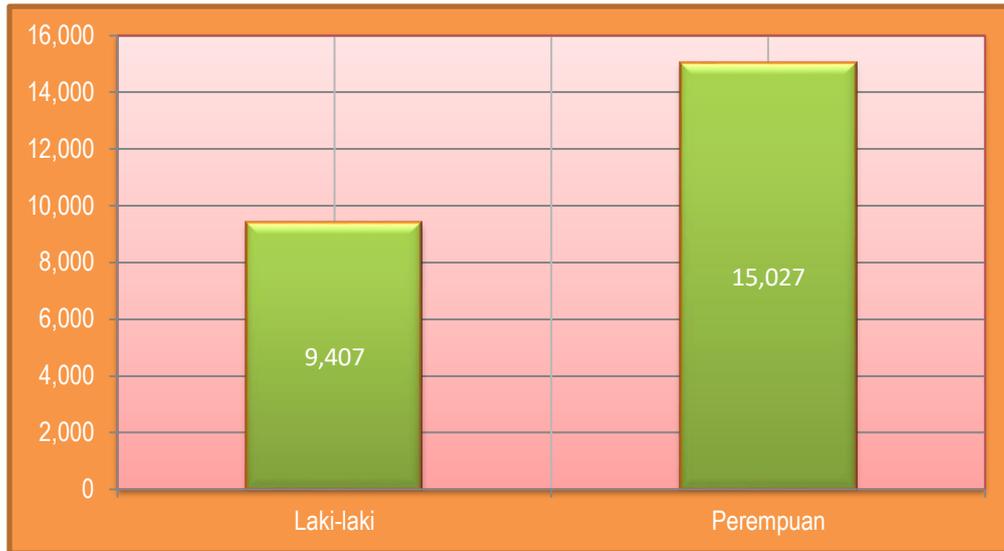
- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas dan kejuruan, pendidikan nonformal dan informal;
- b) penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelayanan di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas dan kejuruan dan pendidikan nonformal dan informal;
- c) pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pendidikan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah atas dan kejuruan dan pendidikan nonformal dan informal;
- d) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan keadaan 31 Desember 2023 sebanyak 24.434 orang terdiri dari tenaga fungsional (Guru, Pengawas, Arsiparis, dan Pustakawan), non fungsional (Pejabat Struktural dan Staf) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

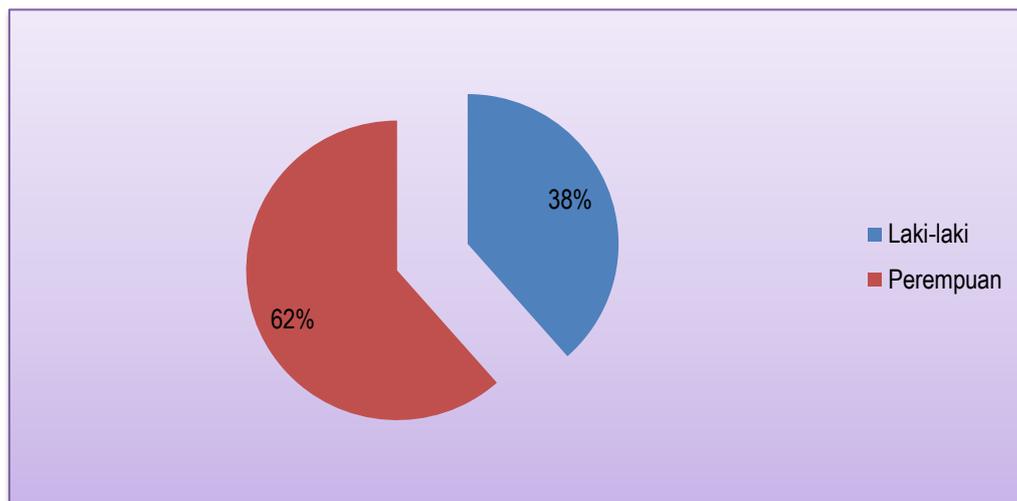
Berdasarkan jenis kelamin Aparatur Sipil Negara/ASN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini :

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	9.407
2.	Perempuan	15.027

Tabel 1.1. Jumlah Aparatur Sipil Negara/ASN dan P3K Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Hukum Disdik Sul-Sel)



Gambar 1.1. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara/ASN dan P3K Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Hukum Disdik Sul-Sel)

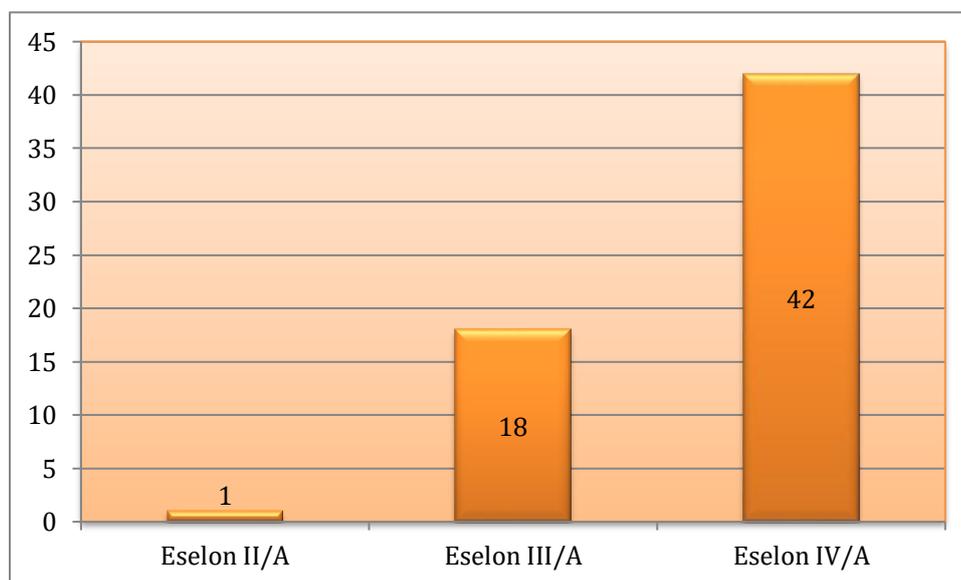


Gambar 1.2. Grafik Presentase Aparatur Sipil Negara/ASN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin
(Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Hukum Disdik Sul-Sel)

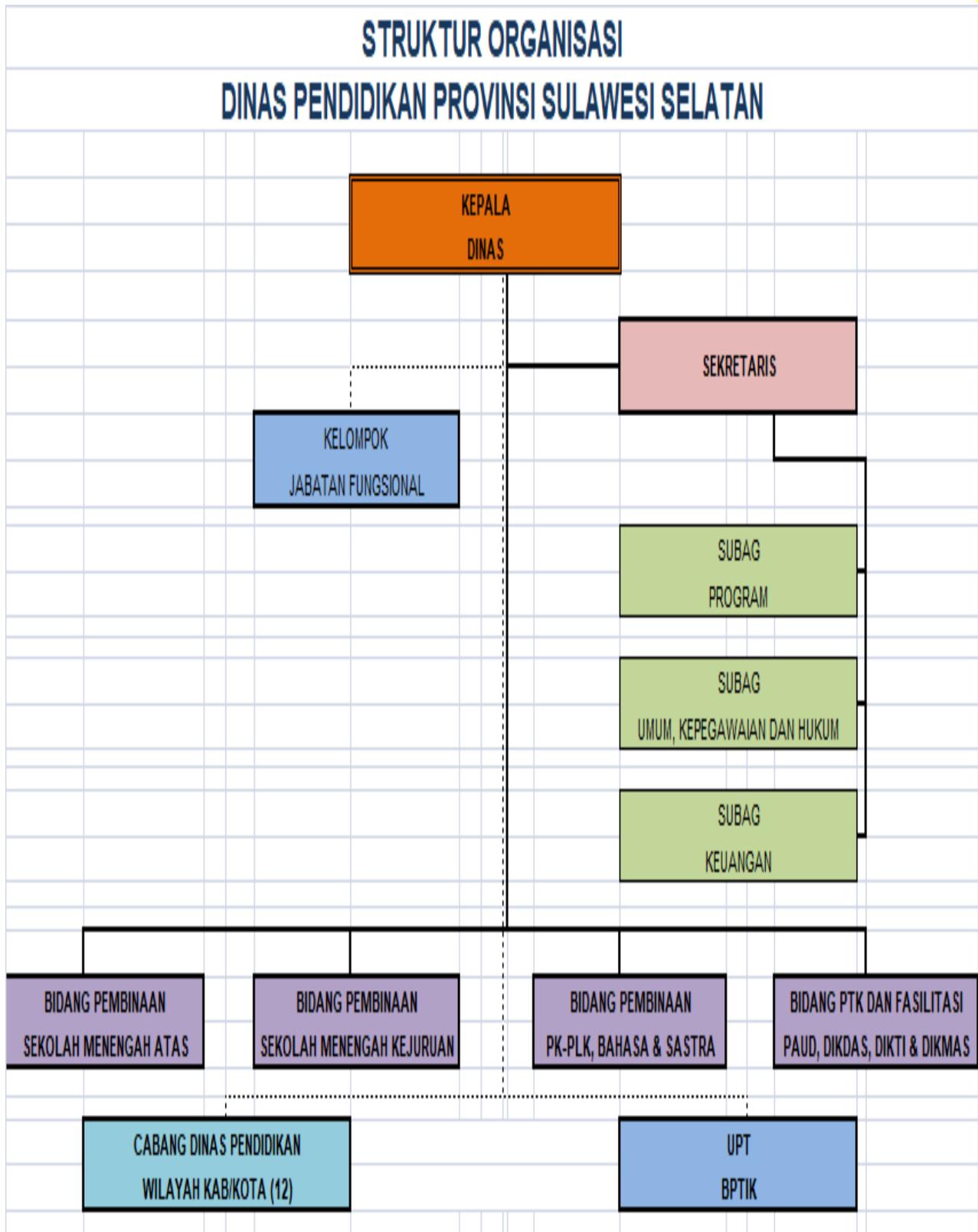
Komposisi dari jumlah tersebut terdapat 1 pejabat struktural setingkat eselon II/A (Kepala Dinas) dan 18 pejabat struktural setingkat eselon III/A termasuk Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPTD dan 42 pejabat setingkat eselon IV/A, diantaranya 7 Kasubag dan 35 Kepala Seksi. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini :

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II/A	1
2.	Eselon III/A	18
3.	Eselon IV/A	42

Tabel 1.2. Jumlah Aparatur Sipil Negara/ASN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Eselon dan Jabatan
(Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Hukum Disdik Sul-Sel)



Gambar 1.3. Grafik Jumlah Aparatur Sipil Negara/ASN Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Eselon dan Jabatan
(Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Hukum Disdik Sul-Sel)



Gambar 1.4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
(Sumber : Subbag Umum Kepegawaian dan Hukum Disdik Sul-Se)

C. Mandat dan Peran Strategis OPD

Ide dasar pendidikan itu adalah kerja membangun manusia supaya dia bisa *survive* melindungi diri terhadap alam serta mengatur hubungan antar-manusia (Freud, 2007: 55-56). Melalui pendidikan terjadi proses di mana suatu kompleks pengetahuan dan kecakapan (*capacities*) diteruskan kepada generasi selanjutnya. Oleh karena itu proses pendidikan hendaknya tetap menganut kepada falsafah pendidikan seperti kerangka konsep Ki Hajar Dewantara bahwa “pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya, sebagai manusia yang utuh berkembang, *menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif)*).



Pesan mengenai ekstensi pendidikan seperti yang diuraikan di atas, maka mandat yang diberikan kepada pengelola pendidikan (OPD Dinas Pendidikan) adalah upaya menyeimbangkan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab

Merujuk dan memperhatikan Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 dengan rumusan **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, inklusif, dan berkarakter”** Dalam rumusan ini terdapat **dua pokok visi yaitu (1) Pemerintahan yang Berorientasi Melayani, Inovatif, dan berkarakter** adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan yang menjadi acuan sebagai Pemerintahan yang melayani, ramah dalam layanan kepada masyarakat, menyederhanakan birokrasi untuk mengundang investasi, dan Pemerintahan yang inovatif dan bekerja dengan orientasi hasil yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dengan acuan bahwa pembangunan yang dilaksanakan berjalan sesuai budaya dan nilai luhur Sulawesi Selatan; **(2) Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan Aksesibel**, adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan yang terkoneksi dengan ekonomi nasional dan regional dengan infrastruktur yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi. Untuk merealisasikan Pemerintahan yang berorientasi Melayani, inovatif, dan berkarakter khususnya pada layanan pendidikan, maka aspek strategis yang perlu dikembangkan SKPD Dinas Pendidikan adalah; **(1) proses pendidikan yang mengembangkan keterampilan dan ilmu pengetahuan** dalam arti adanya proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dan peserta didik itupun sendiri melakukan personal discovery, seperti membaca buku, melakukan penelitian, mengikuti diskusi keilmuan, atau pun perenungan/refleksi. **(2) menjadikan pendidikan sebagai penyalur dan pengembang karakter luhur**, yang mengandung arti bahwa pendidikan bukanlah semata-mata berfungsi sebagai alat penyalur ilmu pengetahuan, namun juga sebagai pendorong berkembangnya nilai-nilai luhur yang menjadi dasar berkembangnya watak yang baik. Watak yang baik itu antara lain berupa sikap jujur, adil, demokratis, disiplin, dan

toleran. **(3) mewujudkan pendidikan sebagai pembangun tumbuhnya rasa kebangsaan** yaitu membangun pemahaman/kesadaran tentang cita-cita pembangunan Indonesia sebagai bangsa yang didasarkan pada nasionalisme kewargaan (*civic nationalism*) yang bertumpu pada rasa kemanusiaan, serta membangun pemahaman/kesadaran pentingnya toleransi dalam menjalankan kehidupan bersama dalam rangka membentuk “kewargaan multikultural” (*multicultural citizenship*) menuju masyarakat kreatif dan responsif.

A. Rencana Strategis

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan “**Negara wajib menyediakan pelayanan pendidikan bermutu bagi semua warga negara**”. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menganut prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu :

1. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia , nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa;
2. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
3. Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
4. Mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Atas pandangan tersebut diatas menjadi landasan dalam Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2018 – 2023. Selain itu rumusan Visi dan Misi tersebut tetap memperhatikan dan mengacu kepada rumusan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, serta rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang termuat Renstra periode 2018 – 2023. Dengan demikian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan rumusan :

"TERWUJUDNYA LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU"

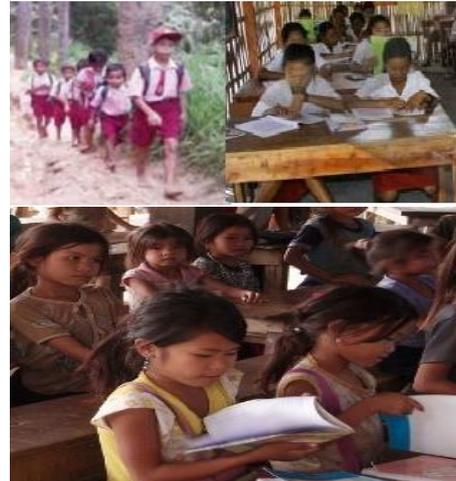
Penjelasan dari pokok – pokok rumusan tersebut adalah :

1. **Layanan Pendidikan**, mengandung makna bahwa Dinas Pendidikan menempatkan posisinya sebagai institusi yang memfasilitasi perkembangan peserta didik secara optimal, sehingga mereka dapat memiliki kesiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dan hidup di tengah-tengah masyarakat secara produktif;



2. **Berkualitas**, bermakna untuk mengembangkan kebijakan terhadap pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam upaya peningkatan wawasan dan pengetahuan untuk melaksanakan proses pembelajaran yang menyeimbangkan hard skill dan soft skill sehingga mencapai mutu yang berkualitas sesuai tuntutan Standar Nasional Pendidikan;

3. **Terjangkau**, mengandung makna keberpihakan terhadap masyarakat tanpa memandang status sosial dan kemampuan untuk memperoleh akses pendidikan bermutu yang seluas – luasnya pada semua jenjang pendidikan sebagai tuntutan untuk memenuhi layanan hak dasar masyarakat



Sejalan dengan rumusan Visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan berkeyakinan dan berupaya untuk tahun 2021 menghasilkan Masyarakat Sulawesi Selatan yang Social Society yaitu masyarakat pembelajar yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing sehingga menunjang dan menjadi tolok ukur ketercapaian Visi dan Misi Gubernur / Wakil Gubernur Terpilih, khususnya dibidang pendidikan. Untuk mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah-langkah berikut ini :

1. Memfasilitasi Pengembangan akses dan kualitas layanan pendidikan
2. Menyediakan dan Memfasilitasi Sarana dan Parasana Pendidikan untuk Mencapai Standar Nasional Pendidikan
3. Mengelola Manajemen Pendidikan Secara Akuntabel, Profesional dan Bertanggung Jawab
4. Memfasilitasi terlaksananya sistem pembelajaran yang bermutu

B. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan pada sektor pendidikan, diperlukan rumusan tujuan dan sasaran yang lebih jelas agar dapat menggambarkan ukuran – ukuran terlaksananya misi dan tercapainya

visi. Rumusan tersebut merupakan arah bagi sikap dan perilaku seluruh pemangku kepentingan pendidikan dalam mewujudkan nilai – nilai, amanah, profesional, kreatif, bertanggungjawab, disiplin, demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu dalam periode tahun 2018 – 2023, Dinas Pendidikan menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

B.1. Tujuan Strategis

Tabel 2.1. Tujuan Strategis

KODE	TUJUAN STRATEGIS
T.1	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan
T.2	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode 2018—2023 adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan (T.1)

Peningkatan efektifitas pengelolaan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik sangat tergantung pada kapabilitas aparat pemerintah daerah dalam mengelola semua sumber – sumber yang dimiliki. Upaya pengelolaan sumber – sumber yang dimiliki merupakan kunci utama menuju kepada terciptanya "Good Governance" . Dalam mewujudkan tata kelola dan akuntabilitas diupayakan dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional, regional dan lokal. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi OPD (Dinas Pendidikan) menjadi panutan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, dan terbebas dari praktik korupsi dan nepotisme

b) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan (T.1.), dimaknai sebagai upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, dimana merupakan mandat yang harus dilakukan dalam memenuhi tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sesuai pasal 28B Ayat (1) “bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia” serta pada pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan “bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan:

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia, bahkan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dan angka melek aksara digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan;

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam peradaban suatu bangsa, oleh karena itu sudah seharusnya pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh warga Negara di seluruh Indonesia.

Sebagai salah satu faktor terbesar dalam upaya mendukung pembangunan sumber daya manusia, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara maksimal dengan memfasilitasi pengetahuan secara baik kepada para peserta didik di semua daerah yang ada di Indonesia.

Ada beberapa faktor yang dapat mendukung upaya pemerataan pendidikan di Indonesia diantaranya Kualitas Tenaga Pendidik, Biaya Pendidikan, sarana dan prasarana pendukung dan lain-lain.

B.2. Sasaran Strategis

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan, diperlukan sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang dicapai pada tahun 2023. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis yang dimaksud dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2023. Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) **(T.1) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan** dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS) sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) TAHUN 2023
SS.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah - Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja kategori baik dan sangat baik - Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)

- b) **(T.2.) Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan,** dapat ditandai dengan tercapainya sasaran strategis (SS) sebagai berikut:

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS) TAHUN 2023
SS.2	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (SPM) 2. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (SPM) 3. Persentase Siswa SMA/SMK yang bebas Buta Aksara Al-Quran 4. Persentase SMA/SMK yang Bebas Narkoba (Indikator RPJMD Pokok) 5. Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal Penambahan Waktu Pelajaran Agama 6. Persentase Pendidikan Menengah yang Menerapkan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK 7. Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah 8. Persentase Guru SMA yang Bersertifikat 9. Persentase Guru SMK yang Bersertifikat 10. Persentase SMA/SMK yang Menerbitkan Karya Sastra 11. Angka Rata Lama Sekolah (RLS) 12. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 13. Indeks Pendidikan

C. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta rencana capaian indikator kinerja yang dijabarkan didalam dokumen Rencana Kerja OPD. Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen OPD untuk mencapainya dalam tahun anggaran berjalan (Tahun 2023). Dalam Rencana Kinerja Tahun 2023 ini, memuat informasi tentang (a) sasaran strategis (b) indikator kinerja dan (c) target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023. Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kelembagaan No: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Peraturan Menteri dalam Negeri No: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja OPD, maka uraian Penetapan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3. : Penetapan Kinerja Tahun 2023
Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan	- Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100,00
	- Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja kategori baik dan sangat baik	%	100,00
	- Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP (%)	%	100,00
2. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan	1. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (SPM)	%	100,00
	2. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (SPM)	%	100,00
	3. Persentase Siswa	%	62,00

	SMA/SMK yang bebas Buta Aksara Al-Quran		
4.	Persentase SMA/SMK yang Bebas Narkoba (Indikator RPJMD Pokok)	%	93,90
5.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal Penambahan Waktu Pelajaran Agama	%	57,25
6.	Persentase Pendidikan Menengah yang Menerapkan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK	%	82,00
7.	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Rasio	1 : 13
8.	Persentase Guru SMA yang Bersertifikat	%	53,20
9.	Persentase Guru SMK yang Bersertifikat	%	46,35
10.	Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra	%	51,05
11.	Angka Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,75
12.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,59
13.	Indeks Pendidikan	%	66,92

D. Penetapan Kinerja

Penetapan / perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden R.I. Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sakip dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang juknis Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan **menjadikan perjanjian kinerja ini sebagai dokumen penetapan kinerja.** Perjanjian Kinerja ini merupakan komitmen untuk

mendukung dan melaksanakan ketercapaian sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam Renstra SKPD dan RPJMD 2018 -2023. Oleh karena itu, Penetapan Kinerja OPD Dinas Pendidikan telah diperjanjikan dengan Pemerintah Provinsi (Gubernur) selaku pemberi tugas / amanah dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Kadis) selaku pengemban tugas / penanggungjawab kinerja. Disamping itu untuk mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Kepala Dinas Pendidikan melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja dengan Kepala Bidang dan Kepala Seksi sebagai bagian pendukung kontrak kinerja dengan Gubernur, yang merupakan kesepakatan yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKU dengan target yang ditetapkan dalam tahun anggaran bersangkutan.

Untuk menunjang ketercapaian kinerja yang telah diperjanjikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran melalui APBD Pokok tahun 2023 **dengan 5 Program**. Alokasi anggaran tersebut telah dibahas bersama dengan BPKD dan DPRD Provinsi, adapun anggaran APBD pokok tahun 2023 untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebesar Rp. 2.991.524.524.379,00

Dalam implementasi pencapaian kinerja ini dengan kebijakan penganggaran melalui APBD-Perubahan, maka alokasi anggaran yang telah ditetapkan untuk menunjang ketercapaian indikator tersebut mengalami perubahan yang semula Rp. 2.991.524.524.379,00 menjadi Rp. 3.117.910.013.772,00 atau bertambah 0,04%.

A. Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara *rencana kinerja (performance plan)* yang diinginkan dengan *realisasi kinerja (performance result)* yang dicapai. Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, digunakan kriteria SMART sebagai akronim dari *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (relevan), dan *timebound* (memiliki batas waktu). Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang indikatornya tertuang dalam IKU, disimpulkan telah memenuhi kriteria SMART.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian kinerja IKU Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Angka Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,75	8,76	100,11
2.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,59	13,54	99,63
3.	Indeks Pendidikan	%	66,92	66,81	99,84
4.	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (SPM)	%	100	86,20	86,20

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5.	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (SPM)	%	100	84,94	84,94
6.	Persentase Siswa SMA/SMK yang Bebas Buta Aksara Al-Quran	%	62,00	92,95	149,92
7.	Persentase SMA/SMK yang Bebas Narkoba (Indikator RPJMD Pokok)	%	93,90	99,95	106,44
8.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal Penambahan Waktu Pelajaran Agama	%	57,25	60,00	104,80
9.	Persentase Pendidikan Menengah yang Telah Menerapkan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK	%	82	86,86	105,93
10.	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	%	1 : 13	1 : 12	108,33
11.	Persentase Guru SMA yang Bersertifikat	%	53,20	52,69	99,04
12.	Persentase Guru SMK yang Bersertifikat	%	46,35	46,85	101,08
13.	Persentase SMA/SMK yang Menerbitkan Karya Sastra	%	51,05	50,57	99,06

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber : (Diolah dari Data Dapodik, BPS, Dukcapil, Emis Kemenag dan Bidang Terkait pada Dinas Pendidikan Sul-Sel)

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 sebanyak 13 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- Sangat memuaskan (capaian di atas 100 persen) sebanyak 7 indikator
- Memuaskan (capaian di atas 90 persen-100 persen) sebanyak 4 indikator
- Cukup memuaskan (capaian di atas 60 persen-90 persen) sebanyak 2 indikator
- Kurang memuaskan (capaian di atas 25 persen-60 persen) sebanyak 0 indikator
- Tidak memuaskan (capaian 0 persen-25 persen) sebanyak 0 indikator

Dari 13 IKU tersebut, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 53.85 persen telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan 30.77 persen telah memenuhi kriteria memuaskan dan 15,38 persen cukup memuaskan. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Dinas Pendidikan Tahun 2023 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah ini :

B. Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2023 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan

Analisis pencapaian **Sasaran : Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Khusus**, selanjutnya dapat dilihat Pada Tabel 3.2. di bawah ini :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi (%)
1. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Khusus	1. Angka Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,75	8,76	100,11
	2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,59	13,54	99,63
	3. Indeks Pendidikan	%	66,92	66,81	99,84
	4. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (SPM)	%	100	86,20	86,20
	5. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (SPM)	%	100	84,94	84,94
	6. Persentase Siswa SMA/SMK yang Bebas Buta Aksara Al-Quran	%	62,00	92,65	149,92

7.	Persentase SMA/SMK yang Bebas Narkoba (Indikator RPJMD Pokok)	%	93,90	99,95	106,44
8.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal Penambahan Waktu Pelajaran Agama	%	57,25	60,00	104,80
9.	Persentase Pendidikan Menengah yang Telah Menerapkan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK	%	82	86,86	105,93
10.	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	%	1 : 13	1 : 12	108,33
11.	Persentase Guru SMA yang Bersertifikat	%	53,20	52,69	99,04
12.	Persentase Guru SMK yang Bersertifikat	%	46,35	46,85	101,08
13.	Persentase SMA/SMK yang Menerbitkan Karya Sastra	%	51,05	50,57	99,06
Rata-rata capaian					103,76

Tabel 3.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Sasaran (Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Khusus)
Sumber : (Diolah dari Data Dapodik, BPS ,Dukcapil, Emis Kemenag dan Bidang Terkait pada Dinas Pendidikan Sul-Sel)

Dari 13 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 7 indikator sasaran kinerja mencapai target dan 6 indikator kinerja sasaran yang belum mencapai target. 6 Indikator kinerja yang belum mencapai target 2 diantaranya yaitu Indikator SPM, yang mana target yang ditetapkan

adalah target nasional yang harus menetapkan target 100%, 4 indikator yang belum mencapai target yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Indeks Pendidikan, Persentase Guru SMA yang bersertifikat, dan Persentase SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada anak usia sekolah yang putus sekolah, tidak melanjutkan, dan anak yang tidak sekolah. Serta persentase Guru SMA bersertifikat dan SMA/SMK yang menerbitkan karya sastra perlu ditingkatkan. Adapun rata-rata capaian untuk semua indikator yaitu sebesar 103,76%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Capaian Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Disdik Sul-Sel	Capaian Nasional
1.	Angka Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,76	8,77
2.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,54	13,15
3.	Indeks Pendidikan	Tahun	66,81	65,76
4.	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (SPM)	%	86,20	-
5.	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (SPM)	%	84,94	-
6.	Persentase Siswa SMA/SMK yang Bebas Buta Aksara Al-Quran	%	92,65	-
7.	Persentase SMA/SMK yang Bebas Narkoba (Indikator RPJMD Pokok)	%	99,95	-
8.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal Penambahan Waktu Pelajaran Agama	%	60,00	-

9.	Persentase Pendidikan Menengah yang Telah Menerapkan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK	%	86,86	-
10.	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	Rasio	1 : 12	1 : 16
11.	Persentase Guru SMA yang Bersertifikat	%	52,69	42,10
12.	Persentase Guru SMK yang Bersertifikat	%	46,85	34,50
13.	Persentase SMA/SMK yang Menerbitkan Karya Sastra	%	50,57	-

Tabel 3.3. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 pada Sasaran (Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Khusus) dengan Capaian Nasional
Sumber : Neraca Pendidikan 2021/2022, dan BPS

Dari 13 indikator, terdapat 6 indikator yang capaiannya dapat dibandingkan dengan capaian nasional dan 7 indikator lainnya belum (belum menemukan sumber capaian nasional), 5 Indikator di atas capaian nasional sedangkan 1 indikator belum mencapai capaian nasional yaitu Angka Rata Lama sekolah (RLS).

c. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

No.	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
		2021	2022	2023
1.	Angka Rata Lama sekolah (RLS)	-	102,49	100,11
2.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	99,63	99,63
3.	Indeks Pendidikan	-	99,70	99,84
4.	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (SPM)	80,55	83,68	86,20
5.	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (SPM)	80,84	82,73	84,94

6.	Persentase Siswa SMA/SMK yang Bebas Buta Aksara Al-Quran	124,48	151,51	149,92
7.	Persentase SMA/SMK yang Bebas Narkoba (Indikator RPJMD Pokok)	100,05	107,61	106,44
8.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal Penambahan Waktu Pelajaran Agama	147,46	132,12	104,80
9.	Persentase Pendidikan Menengah yang Telah Menerapkan Penyelenggaraan dan Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK	101,25	106,49	105,93
10.	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	100	100	108,33
11.	Persentase Guru SMA yang Bersertifikat	107,83	100,07	99,04
12.	Persentase Guru SMK yang Bersertifikat	115,83	102,18	101,08
13.	Persentase SMA/SMK yang Menerbitkan Karya Sastra	100	-	99,06

Tabel 3.4. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran (Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Khusus)

Sumber : (Diolah dari Data Dapodik, BPS, Emis Kemenag dan Bidang Terkait pada Dinas Pendidikan Sul-Sel)

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021-2023, maka rata-rata capaian kinerja pada sasaran **Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan** ada yang mengalami peningkatan dan beberapa indikator mengalami penurunan, Salah satu penyebab turunnya capaian pada beberapa indikator disebabkan karena adanya kenaikan target, dalam hal ini Indikator SPM yang mengharuskan target (100%).



Gambar 3.1. Grafik Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran (Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Khusus)

Sumber : (Diolah dari Data Dapodik, Emis Kemenag, Dukcapil, dan Bidang Terkait pada Dinas Pendidikan Sul-Sel)

d. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

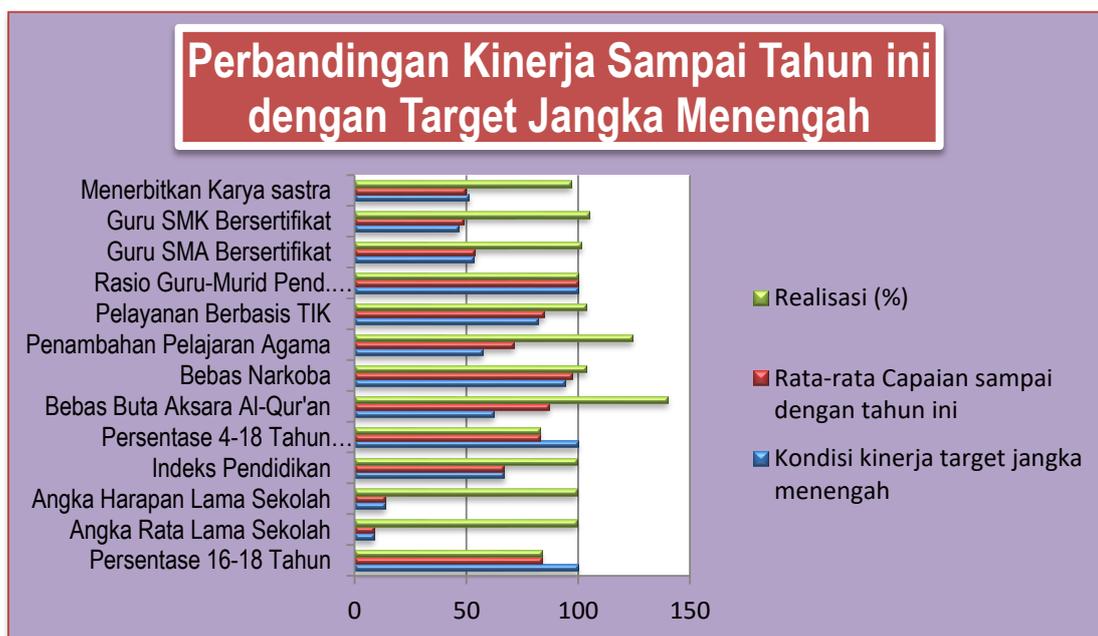
	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata Capaian sampai dengan tahun ini	Realisasi (%)
1.	Angka Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,75	8,69	99,31
2.	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,59	13,53	99,56
3.	Indeks Pendidikan	Tahun	66,92	66,58	99,49
4.	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah (SPM)	%	100.00	83,48	83,48
5.	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (SPM)	%	100.00	82,84	82,84
6.	Persentase Siswa SMA/SMK yang Bebas Buta Aksara Al-Quran	%	62.00	86,87	140,11
7.	Persentase SMA/SMK yang Bebas Narkoba (Indikator RPJMD Pokok)	%	93,90	97,14	103,45
8.	Persentase Sekolah yang Menerapkan Kurikulum Lokal Penambahan Waktu Pelajaran Agama	%	57,25	71,15	124,27
9.	Persentase Pendidikan Menengah yang Telah Menerapkan Penyelenggaraan dan	%	82.00	84,71	103,30

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata Capaian sampai dengan tahun ini	Realisasi (%)
	Pelayanan Pendidikan Berbasis TIK				
10.	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	%	1 : 13	1 : 13	100
11.	Persentase Guru SMA yang Bersertifikat	%	53.20	53,81	101,15
12.	Persentase Guru SMK yang Bersertifikat	%	46.35	48,65	104,96
13.	Persentase SMA/SMK yang Menerbitkan Karya Sastra	%	51,05	49,41	96,79

Tabel 3.5. Perbandingan Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Organisasi pada Sasaran (Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Khusus)

Sumber : (Diolah dari Dapodik, Emis Kemenag, BPS, Dukcapil, dan Bidang Terkait pada Dinas Pendidikan Sul-Sel)

Jika melihat perbandingan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan maka terdapat 6 indikator yang telah mencapai/melampaui target jangka menengah dengan rata-rata capaian antara 100,00%-140,11% dan 7 indikator yang belum mencapai target jangka menengah dengan capaian antara 82,84%-99,56%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2. berikut ini :



Gambar 3.2. Grafik Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada Sasaran (Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Khusus)

Sumber : (Diolah dari Dapodik, Emis Kemendik, BPS, dan Bidang Terkait pada Dinas Pendidikan Sul-Sel)

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Langkah langkah dilakukan dalam pencapaian sasaran **Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan** yaitu dengan melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan sasaran strategis yang ingin dicapai, Beberapa program yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mencapai sasaran tersebut antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Walaupun sudah banyak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah untuk mencapai target sasaran dalam jangka

waktu yang telah ditetapkan, namun beberapa indikator masih belum dapat memenuhi target, dan hal yang harus dilakukan yaitu mengevaluasi penyebab ketidakberhasilan sasaran mencapai target yang ditetapkan dan mengambil langkah terobosan di tahun berikutnya agar target yang diharapkan dapat tercapai.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Alokasi Anggaran untuk pencapaian sasaran **Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan** Tahun 2023 sebesar Rp. 1.107.977.555.377,00 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 766.305.802.349,00 atau terealisasi sebesar 69,16 persen. Dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 103,46% menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien dengan hasil yang dicapai.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran **Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan** ini adalah sebanyak 4 program, 7 kegiatan dan 69 Sub Kegiatan, yaitu: **program Pengelolaan Pendidikan** dengan 3 kegiatan dan 61 Sub kegiatan, **Program Pengembangan Kurikulum**, 2 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan, **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan** 1 kegiatan, 2 Sub Kegiatan dan **Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**, 1 Kegiatan, dan 2 Sub Kegiatan.

2 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Analisis pencapaian **Sasaran: Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan:**

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Realisasi (%)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan	1. Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100
	2. Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	%	100	100	100
	3. Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	%	100	100	100
Rata-rata Capaian					100,00

Tabel 3.6. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 pada Sasaran (Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah)

Sumber : (Tim Olah Data Subbag Program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan)

Berdasarkan Tabel 3.6. menunjukkan bahwa 3 indikator semuanya mencapai target pada Tahun 2023.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

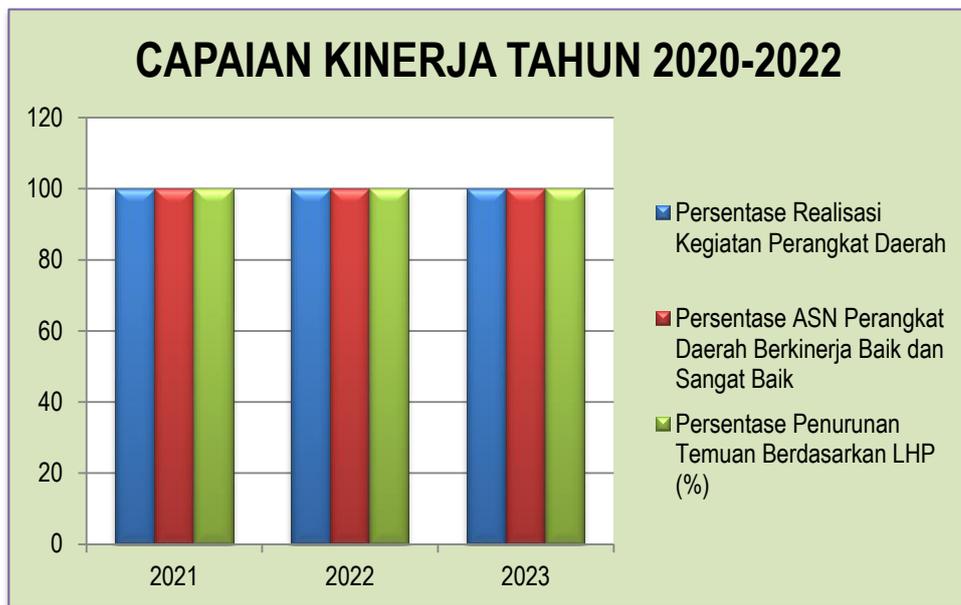
No.	Indikator Kinerja	2021	2022	2023
1.	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100	100	100
2.	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	100	100	100
3.	Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	100	100	100
Rata-rata Capaian		100	100	100

**Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan
2023**

Tabel 3.7. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran (Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah)

Sumber : (Tim Olah Data Subbag Program Dinas Pendidikan Sul-Sel)

Berdasarkan Tabel 3.7. menunjukkan bahwa jumlah capaian sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah** pada 3 tahun terakhir. Adapun capaian yang diperoleh tahun 2023 untuk 3 indikator masing-masing 100% . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.3. berikut ini :



Gambar 3.3. Grafik Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa Tahun Terakhir pada Sasaran (Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah)

Sumber : (Tim Olah Data Subbag Program Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel)

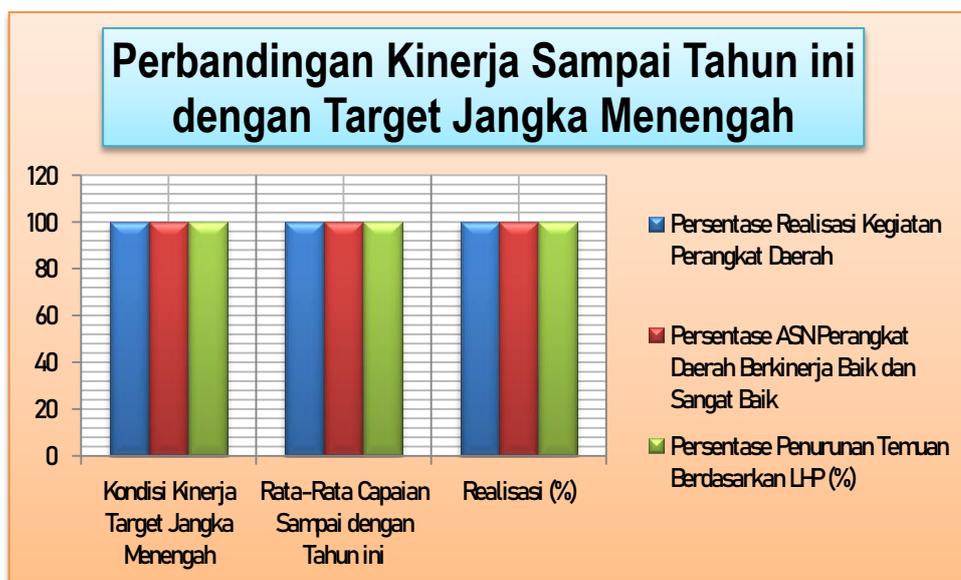
- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah	Rata-Rata Capaian Sampai dengan Tahun ini	Realisasi (%)
1.	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	%	100	100	100
2.	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	%	100	100	100
3.	Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP (%)	%	100	100	100

Tabel 3.8. Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada Sasaran (Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah)

Sumber : (Tim Olah Data Subbag Program Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan)

Berdasarkan Tabel 3.8. di atas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 untuk Sasaran **Peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah** dengan 3 Indikator dapat dilaksanakan 100 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3.4. berikut ini :



Gambar 3.4. Grafik Perbandingan Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada Sasaran (Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah)
Sumber : (Tim Olah Data Subbag Program Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel)

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Langkah langkah yang perlu dilakukan dalam mendukung sasaran **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah** yaitu Perlu kerjasama dari semua bidang di Lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai hasil yang diharapkan.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan untuk pencapaian sasaran pada **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah** adalah sebesar Rp. 2.009.932.458.395,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.985.575.439.816,00 atau 98,79 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **100%** hal ini menunjukkan bahwa **penggunaan anggaran efisien dengan hasil yang dicapai.**

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran pada **Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah** ini adalah sebanyak 7 Kegiatan yaitu: **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, sebanyak 7 sub kegiatan, **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** sebanyak 6 sub kegiatan, **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** sebanyak 2 sub kegiatan, **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah** sebanyak 7 sub kegiatan, **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebanyak 2 sub kegiatan, dan **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** sebanyak 4 sub kegiatan.

C. Realisasi Anggaran

Adapun Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN KEADAAN : DESEMBER 2023				
NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.009.932.458.395,00	1.985.575.680.916,00	98,79
1	KEGIATAN : Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.928.754.700,00	2.741.461.650,00	93,61
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	230.095.000,00	166.143.000,00	72,21
2	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.000.000,00	11.578.000,00	55,13
3	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.000.000,00	6.112.000,00	50,93
4	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.000.000,00	11.178.400,00	93,15
5	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.000.000,00	7.407.500,00	61,73
6	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	1.376.000,00	11,47
7	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.629.659.700,00	2.537.666.750,00	96,50
2	KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.983.388.103.459,00	1.963.249.699.709,00	98,98
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.982.303.387.359,00	1.962.351.450.851,00	98,99
2	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	239.800.000,00	150.866.000,00	62,91
3	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.000.000,00	3.000.000,00	16,67
4	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	154.990.100,00	146.010.000,00	94,21
5	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	444.426.000,00	374.109.858,00	84,18
6	6 Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	227.500.000,00	224.263.000,00	98,58
3	KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	215.700.000,00	215.700.000,00	100,00
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
2	2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	200.700.000,00	200.700.000,00	100,00
4	KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.300.617.452,00	9.221.413.363,00	81,60
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	74.000.000,00	73.992.000,00	99,99
2	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.651.969.652,00	2.928.382.102,00	80,19
3	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.872.500,00	5.167.800,00	13,65
4	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	687.195.000,00	457.473.000,00	66,57
5	5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	841.040.000,00	785.641.500,00	93,41
6	6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.508.540.300,00	1.290.656.961,00	85,56
7	7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.500.000.000,00	3.680.100.000,00	81,78
5	KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	896.572.877,00	650.514.271,00	72,56
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	696.572.877,00	451.014.271,00	64,75
2	2 Pengadaan Mebel	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75
6	KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.043.546.657,00	9.086.539.423,00	90,47
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.935.467.692,00	1.603.415.221,00	82,84
2	2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.108.078.965,00	7.483.124.202,00	92,29

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan
2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5
7	KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.159.163.250,00	410.352.500,00	35,40
	<i>Pemerintahan Daerah</i>			
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	308.738.250,00	270.568.500,00	87,64
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	238.000.000,00	97.579.000,00	41,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.425.000,00	42.205.000,00	99,48
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	570.000.000,00	-	-
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.056.408.477.945,00	723.068.597.680,00	68,45
1	KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	642.744.609.177,00	459.875.538.794,00	71,55
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	2.309.196.940,00	1.876.037.075,00	81,24
2	Penambahan Ruang Kelas Baru	12.950.306.502,00	10.278.089.816,00	79,37
3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4.358.987.190,00	3.039.806.700,00	69,74
4	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	4.365.262.650,00	3.670.413.950,00	84,08
5	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	4.333.999.975,00	2.671.643.635,00	61,64
6	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	3.958.975.175,00	2.889.760.140,00	72,99
7	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	2.418.369.160,00	1.817.274.400,00	75,14
8	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	6.188.864.550,00	4.905.022.780,00	79,26
9	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.073.577.200,00	734.985.580,00	68,46
10	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	344.932.579,00	149.543.351,00	43,35
11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	32.262.003.596,00	25.307.560.462,00	78,44
12	Pembangunan Fasilitas Parkir	704.282.445,00	683.603.657,00	97,06
13	Pembangunan Kantin Sekolah	174.000.000,00	0,00	0,00
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	12.043.518.664,00	9.767.247.914,00	81,10
15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.431.391.100,00	645.868.510,00	45,12
16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	494.180.900,00	226.055.100,00	45,74
17	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	674.132.100,00	346.022.186,00	51,33
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	147.331.800,00	103.132.260,00	70,00
19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	137.527.200,00	96.268.200,00	70,00
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	510.570.939,00	164.415.062,00	32,20
21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	63.399.000,00	63.399.000,00	100,00
22	Rehabilitasi Asrama Sekolah	199.000.000,00	0,00	0,00
23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	23.679.676.385,00	21.152.125.335,00	89,33
24	Pengadaan Mebel Sekolah	27.922.833.400,00	27.141.038.600,00	97,20
25	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	999.900.000,00	987.567.900,00	98,77
26	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	36.857.700.000,00	35.920.750.000,00	97,46
27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	60.570.750.000,00	59.015.223.100,00	97,43
28	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	12.823.511.000,00	12.248.701.912,00	95,52
29	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	28.241.687.500,00	27.418.053.700,00	97,08
30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas	4.443.070.000,00	2.920.166.872,00	65,72
31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	3.621.191.176,00	1.914.455.999,00	52,87
32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	352.440.480.051,00	201.721.305.598,00	57,24

Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan
2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN	
		(Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	
2	KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	379.361.056.926,00	236.238.127.797,00	62,27	
	<i>Sub Kegiatan :</i>				
1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	7.911.394.333,00	4.698.860.880,00	59,39	
2	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	10.710.710.598,00	8.549.471.600,00	79,82	
3	Pembangunan Ruang Laboratorium	4.558.910.947,00	3.843.945.507,00	84,32	
4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.165.945.600,00	831.026.240,00	71,27	
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	736.936.000,00	360.468.000,00	48,91	
6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.944.777.968,00	3.171.814.925,00	45,67	
7	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	1.001.929.524,00	585.330.585,00	58,42	
8	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	216.301.600,00	216.301.600,00	100,00	
9	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	945.788.033,00	911.210.498,00	96,34	
10	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	387.741.720,00	188.741.720,00	48,68	
11	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	16.449.561.780,00	6.129.806.786,00	37,26	
12	Pengadaan Mebel Sekolah	14.874.459.200,00	5.290.260.000,00	35,57	
13	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	6.734.500.000,00	4.846.000.000,00	71,96	
14	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	96.050.009.696,00	66.105.667.618,00	68,82	
15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	199.998.000,00	199.500.421,00	99,75	
16	Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa	703.592.000,00	470.706.652,00	66,90	
17	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.992.711.300,00	386.000.000,00	19,37	
16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	3.732.569.640,00	2.464.425.879,00	66,02	
17	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	204.043.218.987,00	126.988.588.886,00	62,24	
3	KEGIATAN : Pengelolaan Pendidikan Khusus	34.302.811.842,00	26.954.931.089,00	78,58	
	<i>Sub Kegiatan :</i>				
1	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	752.889.600,00	616.904.640,00	81,94	
2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	530.134.400,00	423.787.520,00	79,94	
3	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.140.625.200,00	3.252.863.200,00	78,56	
4	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	611.075.800,00	329.532.560,00	53,93	
5	Pengadaan Mebel Sekolah	1.356.736.000,00	1.352.088.589,00	99,66	
6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1.262.080.000,00	1.088.483.500,00	86,25	
7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100.000.000,00	99.700.000,00	99,70	
8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	199.150.900,00	183.505.100,00	92,14	
9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	614.088.980,00	387.075.860,00	63,03	
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	24.736.030.962,00	19.220.990.120,00	77,70	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	602.667.100,00	562.650.119,00	93,36	
1	KEGIATAN : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	502.040.000,00	467.250.119,00	93,07	
	<i>Sub Kegiatan :</i>				
1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	201.200.000,00	193.395.580,00	96,12	
2	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	100.600.000,00	85.570.953,00	85,06	
3	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	200.240.000,00	188.283.586,00	94,03	
2	KEGIATAN : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	100.627.100,00	95.400.000,00	94,81	
	<i>Sub Kegiatan :</i>				
1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	100.627.100,00	95.400.000,00	94,81	

**Laporan Kinerja Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan
2023**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		(Rp)	Rp	%
1	2	3	4	5
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	50.687.715.732,00	42.435.795.150,00	83,72
1	KEGIATAN : Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50.687.715.732,00	42.435.795.150,00	83,72
	<i>Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi</i>			
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	50.682.315.732,00	42.430.395.150,00	83,72
2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
V	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	278.694.600,00	238.759.400,00	85,67
1	KEGIATAN : Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	278.694.600,00	238.759.400,00	85,67
	<i>Sub Kegiatan :</i>			
1	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi	195.459.400,00	165.859.400,00	84,86
2	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi	83.235.200,00	72.900.000,00	87,58

A. Tinjauan Keberhasilan / Ketidaktercapaian Indikator / Target

1. Keberhasilan

Pada uraian sebelumnya (Bab III) yang menggambarkan hasil analisis ukuran kinerja. Pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU), dari 13 Indikator menunjukkan bahwa, **7 Indikator** dengan nilai **sangat memuaskan atau Capaian diatas 100%. 4 Indikator** dengan nilai **Memuaskan** atau **capaian diatas 90-100%**, **2 Indikator cukup memuaskan atau capaian diatas 60-90%**

Untuk Analisis Capaian masing-masing sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut untuk :

- 1. Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan Menengah dan Khusus** dari 13 Indikator kinerja, menunjukkan bahwa 7 indikator sudah mencapai target yaitu 100% atau lebih, sedangkan 6 Indikator belum mencapai target, adapun Rata-rata capaiannya yaitu 103,76%.
- 2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Bidang Pendidikan**, terdiri dari 3 indikator kinerja, semuanya mencapai target (100%).

Uraian ketidak berhasilan dan solusi untuk pencapaian indikator tersebut secara umum akan diuraikan pada paparan selanjutnya.

Mencermati makna dari Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tertuang dalam RPJMD 2018 – 2023 **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, inklusif, dan berkarakter”** memberikan gambaran bahwa Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menjadi simpul distribusi barang dan jasa, simpul layanan pendidikan dan kesehatan, serta simpul lainnya di luar Jawa dan Kawasan Timur Indonesia pada khususnya. Ini menjadi acuan bagi

dunia pendidikan memberikan kontribusi untuk mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai pusat layanan utama pendidikan baik di luar jawa maupun untuk kawasan Timur Indonesia. Dengan dasar tersebut, maka dilaksanakan beberapa pembinaan baik kepada satuan pendidikan, ketenagaan (pendidik dan tenaga kependidikan) serta pembinaan kesiswaan melalui dukungan pendanaan sesuai alokasi anggaran yang disediakan.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan

Faktor – Faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan program strategis adalah :

1. Adanya kebulatan tekad Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Layanan Pendidikan Untuk masyarakat miskin. Perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bantuan Pendidikan Siswa Miskin terdapat dalam amanat Undang – Undang Dasar 1945 pada Amandemen ke 4;
 - a. Pasal 30 ayat (4) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menyediakan anggaran pendidikan.
 - b. Pasal 31 ayat (1) ”Pendidikan merupakan hak warga negara Indonesia”
 - c. Pasal 31 ayat (2) “ Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya”

Amanat Undang – Undang Dasar Tahun 1945 di atas ditindak lanjuti dalam Undang – Undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan beberapa pasal antara lain:

- a. Pasal 5 ayat ayat (1), “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pada ayat (5) menyatakan “Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat”

- b. Pasal 6 ayat (1) “ setiap warga negara yang berusia 7 s.d. 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”
2. Adanya kewenangan Provinsi dalam pengelolaan pendidikan menengah berdasarkan Undang – Undang No: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan lebih awal melakukan persiapan pengelolaan dengan terbitnya Peraturan Daerah No: 2 Tahun 2016, Tanggal 17 Maret 2016 tentang Pengelolaan Pendidikan lingkup Dikdasmen di Sulawesi Selatan
 3. Pengoptimalan sumberdaya yang ada utamanya sumberdaya manusia dengan pola pemberdayaan untuk melakukan analisis, pemetaan, validasi dan sebagainya. Dalam upaya mengoptimalkan sumberdaya tersebut diusahakan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. dengan prinsip penghematan, efisiensi dan efektivitas serta penyusunan jadwal yang tepat, ketat dan simultan dan atau berkesinambungan.
 4. Pelaksanaan monitoring yang kontinyu sebagai upaya untuk melihat kesesuaian rencana dan pelaksanaan. Dalam monitoring ini dapat dilakukan dalam dua cara masing – masing monitoring langsung yaitu melakukan kunjungan dengan obyek kegiatan, rapat – rapat berkala dan monitoring tidak langsung yaitu mempelajari laporan – laporan yang disampaikan baik laporan bulanan, triwulan dan tahunan. Hasil monitoring dilakukan dengan evaluasi sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan dimasa datang
 5. Pemantapan konsultasi dan koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Stakeholder terutama pada instansi Dinas Pendidikan Kab/Kota, DPRD, Bappeda, Kementerian Pendidikan Nasional, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Masyarakat serta lembaga lainnya yang relevan untuk mendukung terlaksananya pendidikan yang terjangkau dan berkualitas. Koordinasi ini berjalan dengan baik karena masing – masing stakeholder memandang penting pendidikan sebagai

investasi jangka panjang yang melahirkan manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, cerdas dan terampil.

6. Pengawasan melekat yang dilaksanakan secara optimal dan kontinyu diiringi dengan pembinaan dari pengawasan fungsional, sehingga sosialisasi tentang upaya ketercapaian akuntabilitas, transparansi dan profesionalitas terwujud sesuai yang diharapkan. Disamping itu para pengelola dan pengendali program dan kegiatan tetap memperhatikan rambu – rambu peraturan dan perundang – undangan serta juklak / juknis sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas.

3. Ketidaktercapaian Target Indikator

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pendidikan pada tahun 2023, indikator sasaran strategis yang belum memenuhi target capaian, dan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (SPM)

Untuk Tahun 2023 Target untuk Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (SPM) yaitu 100%, namun Pada Tahun 2023 Capaiannya hanya 86,20% atau terealisasi 86.20% dari target yang diharapkan, namun demikian tetap mengalami peningkatan capaian dibanding tahun sebelumnya (2022) yang capaiannya hanya 83,68% atau naik 2,52%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada siswa SMP yang tamat tidak melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMA sederajat. Hal yang paling mendasar **penyebab** ketidak tercapaian indikator tersebut antara lain adanya siswa usia sekolah di tingkat SM (16 – 18 tahun) terutama di daerah tertinggal, terluar, dan

terdepan (3T) belum terlayani karena keterbatasan satuan pendidikan yang terbentuk disebabkan faktor geografis yang sulit dijangkau. Hal lain juga dapat disebabkan karena banyak orang tua yang masih menganggap asal sudah tahu baca, tulis, hitung, sudah bisa menjadi dasar untuk bekerja kasar yang bisa dengan segera menghasilkan uang.

Solusinya adalah meningkatkan ajakan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat dimasa depan, mengajak orang tua siswa untuk mendorong dan memberi kesempatan anak – anaknya menikmati pendidikan minimal tamat jenjang pendidikan SMA atau SMK, sehingga diharapkan dapat memiliki dasar – dasar keterampilan hidup (life skill) untuk peningkatan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, dan mendorong Kab/Kota untuk berkoordinasi dengan stakeholder agar memperbanyak daya tampung melalui pembangunan Ruang Kelas dan atau pembukaan Satuan Pendidikan Satu Atap.

2. Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (SPM)

Untuk Tahun 2023 Target untuk Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk dalam Penduduk Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (SPM) yaitu 100%, Namun Pada Tahun 2023 Capaiannya hanya 84,94% atau terealisasi 84,94% dari target yang diharapkan, namun demikian tetap mengalami peningkatan capaian dibanding tahun 2022 yang hanya 82,73% atau naik sebesar 2,21%. Hal ini menunjukkan bahwa masih

ada penduduk penyandang Disabilitas Usia 4-18 Tahun yang belum berpartisipasi dalam pendidikan khusus atau tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya. Hal mendasar **penyebab** ketidak tercapaian indikator tersebut antara lain, masih ada orang tua siswa penyandang disabilitas yang masih enggan atau malu memasukkan anaknya pada pendidikan khusus, disamping itu sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi belum memadai dan tersedia pada setiap kabupaten/kota.

Solusinya adalah meningkatkan ajakan kepada orang tua siswa penyandang disabilitas agar menjadi penyemangat dan pendorong utama anak mereka dalam mendapatkan tuntunan dan praktek langsung secara bertahap dalam pendidikan khusus. Potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas akan tumbuh berkembang seiring dengan keberhasilan peran guru pendamping dalam memahami dan memupuk potensi anak-anak tersebut, serta dengan menyediakan satuan pendidikan yang memadai bagi siswa penyandang disabilitas di setiap kabupaten/kota yang dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai dan mudah diakses atau dijangkau oleh masyarakat, serta ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan memiliki keahlian dan keterampilan dalam menangani siswa penyandang disabilitas.

3. Angka Harapan Lama Sekolah dan Indeks Pendidikan

Target Angka Harapan Lama Sekolah untuk Tahun 2023 yaitu 13,59 Tahun dengan realisasi sebesar 13,54 Tahun atau dengan capaian 99,63%. Untuk Indeks Pendidikan target untuk tahun 2023 yaitu 66,92 dengan realisasi 66,81 atau dengan capaian 99,84%. Penyebab ketidaktercapaian target

yaitu karena masih banyak anak usia sekolah yang tidak melanjutkan atau putus sekolah karena berbagai macam alasannya diantaranya faktor ekonomi maupun sarana dan prasarana yang masih susah terjangkau diberbagai daerah khususnya 3 T.

Solusinya adalah meningkatkan ajakan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat dimasa depan, mengajak orang tua siswa untuk mendorong dan memberi kesempatan anak – anaknya menikmati pendidikan minimal tamat jenjang pendidikan SMA atau SMK, sehingga diharapkan dapat memiliki dasar – dasar keterampilan hidup (life skill) untuk peningkatan kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, dan mendorong Kab/Kota untuk berkoordinasi dengan stakeholder agar memperbanyak daya tampung melalui pembangunan Ruang Kelas dan atau pembukaan Satuan Pendidikan Satu Atap.